

KEMITRAAN ANTARA PUBLIC-SWASTA: PERSPEKTIF TUJUAN, PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Yusef Patria^{1*}, Senen Mustakim², dan Ahiruddin³

Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Indonesia

*Correspondent author: renizama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kemitraan antara publik dan swasta yang diterapkan di beberapa negara. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didasari atas teori tata pemerintahan baik menyangkut kebijakan pelayanan, infrastruktur, pembangunan kapasitas, dan pembangunan ekonomi serta dampaknya. Diambil dari beberapa literatur tentang tata kelola pemerintahan Grimsey dan Lewis (2007), Bovaird (2004), dan Brinkerhoff (2002) yang mana dalam penelitian ini ditemukan dua hal yaitu: pertama, pelaku sektor publik (nasional dan transnasional) mencari mitra baru untuk berkontribusi sumber daya mereka yang unik dan kapasitas untuk mengatasi tantangan global yang pencarian telah menyebabkan beberapa 'teman seranjang,' gelisah yang menyoroti pentingnya memahami keunggulan komparatif dan kepentingan pelaku datang bersama-sama dalam kemitraan. Ini menempatkan penekanan pada dimensi mutualitas kemitraan jika sinergi diantisipasi harus diperoleh dari kompetensi khas yang berasal dari identitas organisasi. Kesimpulan ini sangat penting untuk keterlibatan diaspora dalam kemitraan pembangunan internasional. Kedua, sementara dominasi sektor publik dapat merusak manfaat diantisipasi kemitraan, jika publicness melekat dalam KPS adalah untuk direalisasikan, tidak harus kepentingan pribadi mendikte hubungan bersama. Mencapai keseimbangan yang tepat dari kepentingan dan insentif antara mitra heterogen menantang. Analisis Goldsmith dari perusahaan sosial KPS dan pengurangan kemiskinan menimbulkan pertanyaan ini, seperti orang lain melihat sektor swasta dan kemitraan pembangunan internasional (misalnya, Kolk et al., 2008). Potensi kepentingan yang berbeda juga hadir dalam penggunaan FBO untuk pelayanan kesehatan, seperti yang dibahas oleh Bovaird (2004).

Kata kunci: Kemitraan, Sektor publik, sektor swasta, standar internasional

Abstract

This study aims to analyze the pattern of partnership between the public and the private sector that is applied in several countries. The type of this research is qualitative research based on the theory of governance both regarding service policy, infrastructure, capacity building, and economic development and its impacts. Based on a number of studies on governance Grimsey and Lewis (2007), Bovaird (2004), and Brinkerhoff (2002) in this study found two things: first, public sector actors (national and transnational) looking for new partners to contribute Their unique resources and capacity to overcome global search challenges have led to some 'friends in a row,' anxious that highlights the importance of understanding comparative advantage and the interests of actors come together in partnership. This places an emphasis on the dimension of mutuality in partnership if anticipated synergy must be obtained from typical competencies derived from organizational identity. This conclusion is very important for diaspora involvement in international development partnerships. Second, while the dominance of the public sector can damage the anticipated benefits of the partnership, if the publicness inherent in the KPS is to be realized, it does not have to mean that personal interests dictate a joint relationship. Achieving the right balance of interests and incentives between challenging heterogeneous partners. Goldsmith's analysis of social enterprise PPP and poverty reduction raises this question, as others see the private sector and international development partnerships (for example, Kolk et al., 2008). Different potential interests are also present in the use of FBO for health services, as discussed by Bovaird (2004).

Keywords: Partnership, public sector, private sector, international standards

PENDAHULUAN

Kemitraan Publik-swasta (KPS) telah lama disarankan dan dianalisis sebagai solusi organisasi untuk menekan masalah sosial yang dapat menghasilkan keunggulan komparatif pada pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Namun, pertanyaan yang sedang berlangsung tetap tentang bagaimana merancang, mengelola, dan menilai KPS. Literatur besar di KPS menderita ketidaktepatan konseptual, dan terintegrasi lemah. Artikel ini berusaha untuk mengatasi masalah ini. Menawarkan diskusi tentang definisi kemitraan dan membangun kerangka kerja yang meneliti fitur dari KPS yang berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu: kebijakan, pelayanan, infrastruktur, pembangunan kapasitas, dan pembangunan ekonomi. Artikel ini merangkum kontribusi untuk simposium: KPS perusahaan sosial yang menargetkan pengurangan kemiskinan, pelayanan kesehatan kemitraan pengiriman dengan organisasi berbasis agama, diaspora sebagai mitra untuk pengembangan internasional, dan Extractive Industries Transparency Initiative. Dalam memeriksa tema lintas sektor, analisis berfokus pada publicness dan potensi untuk mempromosikan norma-norma internasional yang terkait dengan tata kelola yang baik. Kesimpulan mengatasi peran mitra baru di KPS, yang kesulitan-kesulitan dalam mempertemukan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan insentif antara mitra, implikasi dari mewujudkan dan mempromosikan norma-norma internasional pemerintahan yang baik dan nilai-nilai, sumber yang berbeda dari otoritas yang beroperasi di dalam KPS, dan perdagangan-orang antara layanan KPS '.

Kata kunci tata pemerintahan yang baik; norma-norma internasional; kemitraan publik-swasta; publik menyebar dan pelaksanaan norma-norma global dan nilai-nilai liberal, seperti hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, dan 'Kebebasan' yang terkait dengan pembangunan ekonomi (Sen, 1999). Ini adalah fokus ganda masalah simposium ini dan artikel individu yang terdiri itu. Mengejar agenda analitik ini untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dari jangkauan dan potensi KPS dalam konteks ini panggilan untuk mengklarifikasi konsep dan mengembangkan kerangka kerja pengorganisasian yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dan pelajaran di meningkatnya keragaman pengalaman. Literatur tentang kemitraan publik-swasta (KPS) sangat besar, namun tetap bingung dan tidak meyakinkan. Di antara alasan yang ketidakjelasan konseptual, banyaknya definisi, advokasi berbasis ideologi (baik pro dan kontra), dan tradisi penelitian yang berbeda (Wettenhall, 2003; Weihe, 2006; Hodge dan Greve, 2008).

Artikel ini macam melalui beberapa perdebatan, dan merangkum pemahaman kita tentang dasar pemikiran untuk, dan kontribusi dari, KPS. Kami menawarkan kerangka kerja berdasarkan tujuan kemitraan, membangun Bovaird (2004), yang menjadi ciri khas masing-masing tujuan dalam hal struktur dominan organisasi dan proses, metrik kinerja utama, dan dimensi normatif. Selanjutnya, kita membahas tantangan untuk memastikan 'publik' di KPS, yaitu, harus seimbang dengan kepentingan pribadi yang mendorong pelaku sektor swasta untuk bergabung KPS. Penelitian kami ini akan menjelaskan KPS dalam rangka mengenalkan kebijakan

pemerintahan yang terstandar internasional. Bagian selanjutnya merangkum kontribusi untuk masalah khusus beberapa isu-isu kunci. Kami menutup dengan beberapa pengamatan dan kesimpulan yang ditarik dari pemeriksaan kami KPS.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Kemitraan Publik-Swasta (KPS)

Dalam literatur telah kita bahas beberapa istilah, kemitraan, dari berbagai perspektif, termasuk referensi untuk kemitraan sebagai kontraktor-out (Johnston dan Romzek, 2005), aliansi LSM-pemerintah (Brinkerhoff dan Brinkerhoff, 2002), dan kerja sama pemerintah masyarakat lokal (Krishna, 2003; Bank Dunia, 2005), hanya untuk beberapa nama. Berkontribusi untuk hiruk-pikuk analitik yang terkait dengan KPS adalah banyaknya argumen, beberapa berdasarkan studi empiris dan lain-lain mempromosikan kemitraan berdasarkan agenda normatif, sehingga sulit untuk memilah retorika dari realitas (Brinkerhoff, 2002b; Wettenhall, 2003).

KPS memiliki sejarah panjang dalam infrastruktur kota dan pelayanan perkotaan, dan ditangani oleh literatur substansial (lihat, misalnya, Ghobadian et al, 2004; Grimsey dan Lewis, 2007). Sebuah thread yang dominan dalam definisi de KPS menyangkut infrastruktur pembiayaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Misalnya, Koppenjan (2005:137) mendefinisikan KPS sebagai 'bentuk kerjasama terstruktur antara mitra publik dan swasta dalam perencanaan / konstruksi dan / atau eksploitasi fasilitas infrastruktur di mana mereka berbagi atau mengalokasikan risiko, biaya, manfaat, sumber daya dan tanggung jawab 'ini definisi de bergema dalam dari Grimsey dan Lewis (2007: 2.). 'KPS dapat

didefinisikan sebagai pengaturan dimana pihak swasta berpartisipasi dalam, atau memberikan dukungan untuk, penyediaan infrastruktur, dan KPS hasil proyek dalam kontrak untuk badan swasta untuk memberikan layanan berbasis infrastruktur publik.'

Definisi fungsi-spesifik yang kurang bermanfaat dalam menggambarkan peranan KPS. Untuk keperluan latihan analitik ini, Bovaird (2004: 200) definisi adalah langkah ke arah yang benar: KPS adalah 'pengaturan bekerja berdasarkan pada komitmen bersama (atas dan di atas yang tersirat dalam setiap kontrak) antara organisasi sektor publik dengan organisasi lain di luar sektor publik. "konseptualisasi ini menyoroti pentingnya tidak hanya dari keterlibatan lintas sektoral, tapi dedikasi bersama untuk mencapai beberapa jenis hasil patungan, dan pergi 'di atas dan di luar' pokok-agen yang dinamis dari hubungan kontrak. Dengan demikian, kemitraan menyiratkan hubungan lintas-sektoral di mana para pelaku yang terlibat membawa kedua komitmen dan kompetensi untuk meja, sehingga menciptakan sinergi klasik (keseluruhan menjadi lebih dari jumlah bagian-bagian).

Pendekatan yang Brinkerhoff (2002a) yang diperlukan untuk menganalisis kemitraan mempekerjakan dua konsep ini untuk mengembangkan benuansa definisi itu, daripada tegas menentukan apa atau tidak kemitraan, mengakui kemitraan sebagai fenomena yang relatif di mana KPS diberikan mungkin menunjukkan kurang lebih dari mendefinisikan elemen kemitraan. Unsur-unsur ini adalah: mutualitas dan organisasi identitas. Mutualitas meliputi komitmen untuk tujuan bersama dan sejauh mana mitra beroperasi dalam semangat kontrol dan tanggung jawab bersama. menangkap identitas organisasi alasan untuk memilih mitra tertentu

sesuai dengan kompetensi khas mereka; memanfaatkan dan memelihara mereka merupakan dasar dari nilai tambah kemitraan.

Lebih khusus lagi, mutualitas mengacu pada saling ketergantungan, dan memerlukan hak dan tanggung jawab dari masing-masing aktor vis-a-vis yang lain. Tertanam dalam kebersamaan adalah komitmen bersama untuk tujuan kemitraan, dan keselarasan mereka untuk konsisten dengan misi dan tujuan masing-masing organisasi mitra. Mutualitas juga berarti beberapa derajat kesetaraan dalam pengambilan keputusan, sebagai lawan dominasi satu atau lebih mitra. Semua mitra memiliki kesempatan untuk memengaruhi tujuan mereka bersama, proses, hasil, dan evaluasi.

Sedangkan identitas organisasi menangkap kompetensi dan kemampuan organisasi mitra individu khas. identitas organisasi dapat diperiksa pada dua tingkat. Pertama, sebuah organisasi individu memiliki misi sendiri, nilai-nilai, dan konstituen terhadap identifikasi untuk yang bertanggung jawab dan responsif. Pemeliharaan identitas organisasi adalah sejauh mana sebuah organisasi tetap konsisten dan berkomitmen untuk misinya, nilai-nilai inti, dan konstituen. Kedua, dari pandangan institusional yang lebih luas, identitas organisasi juga mengacu pada pemeliharaan karakteristik layanan terutama komparatif dan efektif pada sektor atau jenis organisasi yang organisasi mitra berasal. Seorang pengemudi utama untuk kemitraan yang mengakses sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, tapi kurang atau tidak memadai dalam setiap cagar biosfer satu aktor. aset tersebut dapat memerlukan sumber daya keras uang dan bahan, serta sumber daya penting yang lembut, seperti keterampilan manajerial dan teknis,

informasi, kontak, dan kredibilitas / legitimasi.

Berdasarkan dua dimensi ini, KPS, dalam hal praktis, dapat didefinisikan sebagai masalah derajat. Tipe ideal akan memaksimalkan iden-titas organisasi dan kebersamaan, termasuk kesetaraan pengambilan keputusan. Karena dukungan dan menghormati identitas mitra pasti memerlukan kompromi, dan kesetaraan tepat kekuasaan dalam pengambilan keputusan adalah tidak realistis, kemitraan menjadi praktek relatif. Namun demikian, dimensi ini dapat digunakan untuk kontras kemitraan (identitas organisasi yang tinggi, kebersamaan yang tinggi) dari jenis lain hubungan antar-organisasi, seperti tertular (identitas organisasi yang tinggi, mutualitas rendah), ekstensi (identitas organisasi rendah, mutualitas rendah), dan kooptasi atau penyerapan bertahap (identitas organisasi rendah, mutualitas tinggi) (Brinkerhoff, 2002a).

Dengan demikian, kami definisi mengakui kolaborasi lintas sektoral yang mewakili gambaran sepenuhnya kemitraan antara lain: mengenai tujuan bersama, pengambilan keputusan kolaboratif dan konsensus berbasis, non-hirarkis dan struktur dan proses horizontal, kepercayaan berbasis dan informal serta hubungan formal, interaksi sinergis antara mitra, dan akuntabilitas untuk hasil dan hasil secara bersama.

Dasar Pemikiran Kemitraan

Kemitraan telah paling sering dipromosikan sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pemerint-tahan; ini adalah yang paling jelas, misalnya, di New Public Management - NPM (lihat Osborne, 2000; Bovaird, 2004). Kemitraan juga usaha sarat nilai, dan dapat dipromosikan untuk tujuan memaksimalkan daya tarik bagi para pemangku kepentingan dan pemilih,

representasi, dan resolusi konflik yang. Secara umum, masing-masing pelaku memilih untuk mitra untuk satu atau lebih dari empat alasan berikut¹:

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui ketergantungan pada keunggulan komparatif, sebuah divisi rasional tenaga kerja, dan sumber daya mobilization² Kombinasi ini dapat menyebabkan tambahan (meskipun mungkin dramatis) perbaikan dalam tujuan kemitraan ini dirancang untuk mencapai.

(2) Untuk menyediakan banyak sumber daya, dimana sumber daya terpadu dan solusi yang dibutuhkan oleh ruang lingkup dan sifat dari masalah yang ditangani. Dalam beberapa kasus, kemitraan dikejar karena alasan kepatuhan mana undang-undang telah menetapkan bahwa solusi lintas-sektoral diperlukan.

(3) Untuk berpindah dari situasi yang tidak menguntungkan antara beberapa aktor untuk kompromi dan potensi situasi menang-menang (yaitu, dalam menanggapi masalah tindakan kolektif atau kebutuhan untuk resolusi konflik yang). Dimungkinkan untuk melanjutkan tanpa kemitraan, tapi pemangku kepentingan akan tetap tidak puas dan terus mengalami kerugian.

(4) Untuk membuka proses pengambilan keputusan untuk mempromosikan operasionalisasi yang lebih luas dari publik. Dimensi normatif berusaha untuk memak-simalkan representasi dan proses demokrasi; perspektif pragmatis memandang ini sebagai sarana untuk menjamin keberlanjutan.

Selain ini alasan-alasan umum, pemerintah dapat memilih untuk bermitra

dengan jenis tertentu dari pelaku untuk lebih spesifik alasan yang berkaitan dengan tujuan substantif kemitraan. Namun, alasan ini mungkin mencerminkan stereotip yang salah atau non-perwakilan yang berkontribusi terhadap harapan naif tentang apakah dan bagaimana tujuan kemitraan dapat dicapai. Misalnya, LSM dapat memberikan keunggulan komparatif dalam membangun kepercayaan dan outreach (lihat, misalnya, Brinkerhoff dan Brinkerhoff, 2002; Brinkerhoff et al, 2007.), Namun karena sektor kabur, meskipun retorika sebaliknya, banyak LSM telah kehilangan ini layanan melalui partisipasi mereka dalam 'bazaar sedekah' (Smillie, 1995).

Dasar pemikiran untuk kemitraan pemerintah dengan tujuan memperoleh profit sektor swasta yang lebih baik³, instrumen, dan normatif. Dari sisi perspektif instrumental, bermitra dengan sektor swasta mampu akses pemerintah untuk keahlian teknis dan membangun jaringan untuk berbagi sumber daya komplementer. Untuk KPS infrastruktur yang mengakses swasta pendanaan, pembagian risiko publik-swasta adalah salah satu driver, baik sebagai sarana meningkatkan investasi di barang publik dan memberikan insentif kinerja. Sebagai Hodge dan Greve (2007) menunjukkan, bagaimanapun, track record dari KPS sebagai kendaraan manajemen risiko adalah campuran; mereka mengutip berbagai penilaian yang menimbulkan pertanyaan tentang nilai untuk uang alasan, dan tata kelola dokumen dan kegagalan regulasi.

Di sisi insentif, KPS mungkin memiliki tujuan eksplisit mengimpor praktek 'lugas' dan berpikir, termasuk mekanisme penegakan bottom-line dan kompetisi. Sementara disajikan sebagai

¹ 3North (2004) menekankan potensi kemitraan untuk mengurangi biaya transaksi.

² diadaptasi dari Brinkerhoff (2002b).

Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan

³ Karena diskusi tentang mengapa bisnis mengejar kemitraan, lihat Austin (2007).

upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tujuan tersebut juga didasarkan pada keyakinan normatif bahwa sektor swasta secara inheren yang 'Lebih baik' di manajemen daripada sektor publik. Orientasi normatif semacam itu menyebabkan apresiasi pemahaman dramatis dari pemerintah peran unik harus bermain dalam penyediaan layanan publik. Mengontrakkan dan konon pengaturan lebih menguntungkan di bawah retorika KPS memiliki secara signifikan mengurangi kapasitas banyak pemerintah untuk berpartisipasi secara efektif dalam dan mengawasi pengaturan ini dan untuk memastikan mereka responsif terhadap tuntutan warga dan berkontribusi lebih luas, visi yang lebih strategis dari barang publik (lihat Rhodes, 1997). Dengan kata lain, kita belum cukup siap menanggapi pertanyaan (Provan dan Kenis, 2007: 229) 'efektivitas untuk siapa?'. Untuk alasan ini, kami pikir itu tepat waktu untuk lebih eksplisit memeriksa publicness KPS dan bagaimana berbagai jenis KPS mengatasi keseimbangan antara dampak swasta dan publik dan manfaat (lihat di bawah).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kemitraan

Tidak ada kerangka kerja analitis tunggal dapat menangkap keragaman, parameter yang relevan, dan kualitas dari KPS. Kami mengusulkan kerangka kerja berbasis tujuan-sini yang meneliti ekspresi mendefinisikan fitur dari kemitraan diidentifikasi di atas yang berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk: kebijakan, pelayanan, infrastruktur, pembangunan kapasitas, dan pembangunan ekonomi. tujuan ini sampai batas tertentu reflektif analitik sungai dan badan-badan terkait sastra, meskipun tidak sepenuhnya. Kami pilih

ini sebagai prinsip pengorganisasian kami karena dalam banyak kasus keputusan untuk mengejar KPS berasal dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian kerangka ini peta relatif erat dengan aplikasi dari KPS di dunia nyata, dan memfasilitasi mengejar analisis kebijakan dan praktek yang relevan.

KPS kebijakan berusaha untuk merancang, advokasi, koordinasi, atau memantau kebijakan publik dari berbagai jenis: sektoral, nasional, dan / atau global. struktur kemitraan dapat bervariasi dari masalah-spesifik jaringan yang lebih longgar dan informal untuk komite yang lebih formal lintas sektoral, satuan tugas, atau komisi khusus. KPS tersebut dapat fokus pada aspek teknis dari kebijakan, tetapi mereka sering terperangkap dalam politik juga (lihat Rhodes, 1990)⁴. Jejaring kebijakan ini telah muncul sebagai struktur transnasional penting untuk melibatkan pemerintah pada isu-isu kebijakan global (lihat Keck dan Sikkink, 1998).

Metrik kinerja untuk kebijakan KPS berbaur masalah teknis, seperti meningkatkan kualitas solusi untuk masalah kebijakan di tangan melalui menggabungkan keahlian dan pengalaman dari para mitra, dengan pertimbangan politik, seperti intermediasi kepentingan negara-masyarakat dan respon dari kebijakan untuk kelompok masyarakat tertentu, kemampuan untuk membangun konsensus di antara konstituen kebijakan, dan legitimasi dan 'berdiri' dari mitra (misalnya, siapakah mereka berbicara untuk dan dengan otoritas apa?). Pertimbangan kedua

⁴ jaringan kebijakan menimbulkan perdebatan yang sama seperti yang di kemitraan terkait dengan definisi konsep, batas analitik, dan dinamika operasional. Lihat, misalnya, Bozeman (2002).

contoh prinsip-prinsip normatif sering digunakan untuk menilai KPS kebijakan. Ini termasuk kekhawatiran tentang ekuitas dan representasi pluralis; peluang untuk, dan komitmen untuk, partisipasi; dan transparansi (terkait dengan berbagai aspek operasional kemitraan serta hasil kebijakan).

Layanan pengiriman KPS terlibat aktor non-negara dalam memberikan pelayanan publik melalui memisahkan pembayaran untuk pelayanan publik dari ketentuan mereka. Pemerintah (dalam kasus negara-negara miskin, dibantu oleh donor) mempertahankan tanggung jawab untuk pendanaan dan pembayaran, dan outsourcing penyediaan layanan kepada swasta dan / atau sektor non-profit. Komponen kemitraan sejati KPS untuk tujuan ini sering diperdebatkan, karena mekanisme yang paling umum yang menghubungkan mitra adalah beberapa bentuk kontrak, yang kembali berdampak pada rendah tingkat mutualitas. Sejauh KPS beroperasi dengan komitmen bersama dan akuntabilitas, dan perencanaan bersama dan konsultasi tentang campuran layanan, hubungan menunjukkan lebih dari fitur (sebagai lawan hanya bahasa) kemitraan. Bergerak menuju hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan dan komitmen menggeser dasar kontrak dari KPS dari kontrak tradisional untuk satu relasional (Bovaird, 2004). Kedua metrik kinerja dan dimensi normatif pelayanan KPS mencerminkan asal-usul mereka di NPM dan dorongan untuk perampingan sektor publik, deregulasi, dan ketergantungan pada mekanisme pasar (lihat Rosenau, 2000). Metrik mengemudi pemerintah-LSM kemitraan pelayanan tambahan menjangkau populasi terlayani dengan layanan khusus.

Infrastruktur KPS, seperti disebutkan di atas, membawa bersama-sama pemerintah dan sektor swasta untuk

membiayai, membangun, dan mengoperasikan infra-struktur seperti pelabuhan, jalan raya, limbah dan pengolahan limbah fasilitas, telekomunikasi, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya (Sansom, 2006; Grimsey dan Lewis, 2007; Andres et al, 2008). Infrastruktur KPS menggunakan berbagai struktur dan proses, seperti usaha patungan dengan kedua perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional untuk mendapatkan teknologi dan modal, perjanjian build-operate-transfer (BOT) dari berbagai jenis, dan dana pinjaman atau trust (misalnya, kredit perumahan dana). Seperti dengan layanan pengiriman, metrik dan norma-norma untuk infrastruktur KPS kinerja berasal dari prinsip-prinsip privatisasi dan deregulasi yang mendasari NPM: mekanisme pasar yang mempromosikan efisiensi dan kualitas, penekanan pada nilai uang, dan penciptaan kapasitas berkelanjutan untuk operasi infrastruktur publik dan pemeliharaan (lihat, misalnya, Koppenjan dan Enserink, 2009).

Infrastruktur KPS tidak tanpa kontroversi: ada perdebatan mengenai apakah memang outsourcing untuk sektor swasta melalui usaha patungan atau BOT menghasilkan penghematan biaya dan defisiensi efisiensi bagi pembayar pajak bahwa pemerintah beriklan, dan apakah jangka panjang kunci KPS dalam pengaturan yang membatasi pemerintah fleksibilitas (Hodge dan Greve, 2007). Perdebatan ini menyangkut nilai instrumental dari KPS infrastruktur; Kontroversi lain datang dari sisi normatif. Ketika penyediaan barang publik, seperti air dan listrik, outsourcing untuk penyedia swasta yang berusaha untuk memulihkan biaya mereka melalui biaya pengguna, beberapa kritikus menganggap bahwa KPS seperti menyangkal mereka yang tidak bisa membayar orang miskin

dan terpinggirkan hak dasar untuk barang publik .

Pembangunan kapasitas KPS mungkin dalam beberapa alamat kasus kebutuhan pelayanan, tetapi mereka secara eksplisit fokus pada membantu untuk mengembangkan keterampilan, sistem, dan kemampuan yang memungkinkan kelompok-kelompok atau organisasi yang ditargetkan untuk bantuan untuk membantu diri mereka sendiri. donor internasional adalah sumber utama dukungan untuk KPS tersebut, dan mereka dapat ditemukan di berbagai sektor: kesehatan, pendidikan, penge-lolaan lingkungan, pengembangan masyarakat, dan pertanian. Wescott (2002) menawarkan contoh global, regional, dan nasional kemitraan untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pesisir terpadu yang dikombinasikan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat. Beberapa di antaranya adalah penge-tahuan dan penelitian kemitraan, seperti Kelautan Australia dan Pesisir Jaringan Masyarakat; lain menawar-kan kursus pelatihan dan / atau proyek percontohan perilaku, seperti Kemitraan daerah dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Seas of East Asia (PEMSEA). Pengembangan kapasitas KPS dapat berupa jaringan pengeta-huan longgar, twinning organisasi, MOU, atau kontrak formal. Mereka sering memiliki orientasi normatif yang menyoroti otonomi dan lembaga kelompok dibantu untuk menerapkan kapasitas baru mereka seperti yang mereka inginkan. Kepemilikan dan pemberdayaan dinilai sebagai me-ningkatkan kemandirian dan lembaga.

Kapasitas adalah konsep yang luas, dan tidak mudah untuk mengkarakterisasi dalam hal metrik kinerja. Pengembangan kapasitas KPS dinilai menggunakan beberapa langkah, termasuk (mungkin

sederhana) keterampilan dan transfer pengetahuan, penciptaan sistem organisasi mengemukakan sebagai terhubung ke kemampuan untuk melakukan (misalnya, perencanaan, penganggaran, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi), modal intelektual (ditunjukkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan), dan modal sosial (keterampilan dan pengetahuan ditambah jaringan komunikasi dan kepercayaan).

pembangunan ekonomi KPS adalah kolaborasi lintas sektoral yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Di AS, Eropa, dan Inggris, kemitraan seperti yang umum di kota, kabupaten, dan tingkat negara, dengan kombinasi lokal, negara bagian, dan pendanaan federal; misalnya, program Mainstreet USA. Di kategori ini jatuh banyak dari kemitraan lahir pada sisi sektor swasta dari program tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmen ke baris bawah dua atau tiga. Pemerintah dan mitra donor internasional sering memainkan peran broker, baik dari segi fi nance dan mencocokkan perusahaan-perusahaan swasta dengan LSM dan / atau masyarakat lokal. USAID Global Development Alliance (GDA) adalah salah satu example.⁶ KPS pembangunan ekonomi dapat mengambil bentuk joint venture, kontrak, atau MOU. Di tingkat global, KPS bertujuan mobilisasi sumber daya, sering untuk sektor-spesifik kontribusi fi c untuk pembangunan ekonomi di negara-negara miskin (lihat Banteng dan McNeill, 2007). Contoh yang terakhir ini adalah Global Fund untuk memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (GFATM), Global Environment Facility (GEF), dan Fasilitas Pembiayaan untuk Remittances. Metrik Kinerja fokus pada langkah-langkah pengurangan kemiskinan, profitabilitas dan keberlanjutan

pengusaha baru dibuat (misalnya, program lembaga keuangan mikro), triple bottom line atas-mencatat, dan mobilisasi sumber daya. norma mengemudi termasuk pemberdayaan dan penentuan nasib sendiri, pemerataan manfaat, dan perhatian terhadap masuknya kelompok ekonomi atau sosial yang terpinggirkan (misalnya, perempuan, masyarakat adat, dan kasta dikecualikan).

Tabel 1 menjelaskan teori KPS ni menyangkut pemetaan praktis tipologi KPS, metrik terkait, dan tujuan normatif terkait dengan kemitraan individu di sektor tertentu atau negara. Namun, di luar fokus individu ini, KPS adalah ekspresi dari modalitas pemerintahan alternatif untuk hierarki dan pasar. Karena itu, mereka perlu dianalisis dan dinilai dari perspektif yang menyumbang mereka sebagai instrumen untuk mencapai pemerintahan yang baik (Bovaird, 2004; Brinkerhoff, 2007; Edgar et al, 2006). Artinya, selain adanya manfaat spesifik yang KPS dirancang, kita perlu mengevaluasi sejauh mana (a) KPS menghasilkan layanan publik, dan (b) perilaku mitra sejajar dengan prinsip dan praktek good governance.

Fokus pada tata pemerintahan yang baik mengarah ke pemeriksaan KPS yang bergerak melampaui tujuan tambahan kation modi fi dalam praktek untuk memperkenalkan sistem perubahan (Mandell dan Steelman, 2003) yang ada. perspektif ini juga dapat memperpanjang peran KPS di luar sistem pemerintahan nasional ke dunia internasional (lihat bo rzel dan Risse, 2005; Banteng dan McNeill, 2007). Dengan demikian, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang diakui secara internasional dan norma-norma dapat dimasukkan bukan hanya dalam operasionalisasi KPS tetapi dalam tujuan mereka.

Tabel 1 merangkum kerangka. Untuk setiap tujuan, tabel menunjukkan

struktur utama organisasi dan proses, metrik kinerja, dan dimensi normatif terkait. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kemitraan dapat dioperasionalkan melalui berbagai pengaturan, mulai dari informal untuk mengikat secara hukum. Paling sering diasumsikan bahwa perjanjian formal akan codi fi ed dalam kontrak. Namun, mitra dapat mempertimbangkan bahwa mutualitas lebih mudah ditangkap dalam proses desain dan hasil dari mekanisme ini melalui apa yang disebut 'Kesepakatan Kemitraan' (Evans et al., 2004).

Kasus-Kasus Isu Pemerintahan

Tabel 1. kemitraan publik-swasta: taksonomi berdasarkan tujuan

KPS purpose	Organizational structures and processes	Performance metrics	Normative dimensions
Policy	Network	Technical quality	Equity/representativeness
Service delivery	Task force	Responsiveness	Citizen participation
	Joint committee	Consensus-building	Transparency
	Special commission	Legitimacy	Accountability
	Co-production	Quality	Business values and incentives
	Joint venture	Efficiency	Access
Infrastructure	Contract	Effectiveness	Responsiveness
	Partnership agreement (MOU)	Reaching targeted beneficiaries	Accountability
	Joint venture	Quality	Business values and incentives
	Build-operate-transfer	Efficiency	Access
	Build-operate-own-transfer	Value for money	Responsiveness
Capacity building	Design-build-operate	Maintenance and sustainability	Ownership
	Knowledge network	Skills transfer	Agency
	Twining	Intellectual capital	Empowerment
	Contract	Social capital	Autonomy/independence
	Partnership agreement (MOU)	Organizational systems and output	
Economic Development	Joint venture	Poverty reduction	Equity
	Contract	Profitability	Social inclusion
	Partnership agreement (MOU)	Sustainability	Empowerment

Sumber: Edgar, 2006

KPS dan Layanan KPS

Seperti review di atas menunjukkan, meskipun alasan berasal mereka, dalam prakteknya banyak KPS mungkin tidak memiliki layanan publik, baik karena pelaksanaan miskin (termasuk peraturan pemerintah yang tidak memadai) atau insentif miring; dan / atau mereka mungkin menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti jangka panjang 'mengeruk' kapasitas pemerintah (lihat Rhodes, 1997). Keuntungan bagi sektor swasta, seperti reputasi dan profit, serta berbagi keuntungan (misalnya, biaya / pembagian risiko dan inovasi),

diperlukan untuk insentif yang memotivasi pelaku untuk membentuk dan berpartisipasi dalam KPS. Namun, ini tidak selalu sejalan dengan tujuan sosial utama yang KPS dirancang. Misalnya, KPS dapat membatasi persaingan dan pilihan, meningkatkan biaya untuk konsumen, dan membatasi akses ke inovasi. Risiko ini sudah dikenal dalam praktek dan literatur tentang hak kekayaan intelektual, dengan kasus terdokumentasi tentang farmasi, dan di industri komputer, misalnya, pemrograman filantropis Microsoft di Afrika (Jual, 2009).

Semua KPS, untuk membenarkan partisipasi sektor publik, berusaha untuk menghasilkan setidaknya beberapa keuntungan publik dan memasukkan norma-norma yang dalam banyak kasus yang reflektif dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagai tipologi di atas diringkas dalam Tabel 1 menjelaskan. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa praktek mereka dapat jatuh pendek dari ideal. Gambar 1 menggambarkan matriks distribusi manfaat ts (dimaksudkan dan / atau menyadari). Dari perspektif good governance, sebuah KPS yang ideal akan menghasilkan keuntungan publik yang lebih signifikan, dan akan jatuh baik Quadrant 2 atau 4. Untuk mitra swasta, Quadrant 2 - baik manfaat public private dan tinggi tinggi - akan diinginkan, tapi Quadrant 1 bisa memegang beberapa menarik juga. Salah satu aspek dari perdebatan mengenai infrastruktur KPS adalah apakah atau tidak mereka jatuh ke dalam Kuadran 1 atau 2. KPS di Quadrant 3 tidak akan mungkin dimulai, atau jika diluncurkan tidak akan dipertahankan untuk waktu yang lama, karena akan di baik pemerintah maupun kepentingan aktor swasta '.

		Public Benefits	
		Low	High
Private Benefits	High	1	2
	Low	3	4

Gambar 1. Pemetaan Keuntungan KPS
Sumber: Bovaird, 2004

Gambar 1 menunjukkan bahwa KPS dapat dipetakan bersama dimensi dan kesesuaian dan / atau efektivitas dinilai sesuai. Tabel ini bergerak melampaui metrik kinerja yang diidentifikasi dalam Tabel 1 untuk menyoroti sejauh mana mereka metrik pada akhirnya berkontribusi pada publik. Tentu saja, Definisi dari layanan publik' yang subjektif dan ideologis, dan KPS yang dinamis, sehingga lokasi tepat mereka dalam Tabel 1 ini matriks dapat dikenakan interpretasi dan dapat berubah dari Timur⁵. Yang mengatakan, tempat grafis benefit publik yang tepat sebagai kriteria evaluatif pusat, mengingat bahwa KPS mengaburkan garis antara peran dan tanggung jawab publik dan swasta. Selanjutnya, ini menunjuk-kan bahwa orang-orang KPS yang lebih tinggi di masyarakat daripada manfaat pribadi (dirasakan dan / atau aktual) mungkin cenderung untuk menikmati dukungan publik yang lebih besar, dan akan diberikan legitimasi oleh warga.

KPS dan norma-norma pemerintahan internasional yang baik

Khusus untuk KPS yang tujuannya

⁵ Pesch (2005) melihat dari aspek ideologis mendefinisikan publicness dan layanan publik.

mengatasi masalah kebi-jakan global atau mengejar tujuan-tujuan pembangunan ekonomi, aktor transnasional angka sering di antara mitra; misalnya, perusahaan multi-nasional, koalisi advokasi global, dan lembaga multilateral (misalnya, Keck dan Sikkink, 1998; Waddell dan Khagram, 2007). Sejauh mana KPS tersebut bisa memperkuat atau memajukan norma pemerintahan internasional yang baik bervariasi. Sebuah faktor yang berkontribusi terhadap variasi yang adalah jenis otoritas yang anggota KPS memiliki akses dan dapat memobilisasi. Avant et al. (2010: 11) mengidentifikasi lima dasar kewenangan untuk apa yang mereka sebut 'gubernur global: kelembagaan, didelegasikan, ahli, berprinsip, dan kapasitas. KPS paling sering berfungsi dengan tanggung jawab didelegasikan, di mana otoritas adalah 'pinjaman' dari aktor otoritatif lainnya, dalam hal ini pemerintah nasional dan / atau lembaga multilateral (misalnya, Uni Eropa, PBB, Organisasi Perdagangan-an Dunia). Delegasi tersebut bisa 'berlumpur hubungan antara prefe-rensi negara dan hasil'. wilayah dikaburkan ini membuka pintu bagi mempromosikan norma-norma inter-nasional yang mungkin tidak niat eksplisit berpartisipasi aktor-aktor negara, bahkan ketika mereka mungkin seolah-olah menganggap ke retorika KPS tertentu. Non-negara peserta KPS dapat menambah kekuatan didelegasikan dengan otoritas Expert- dan kapasitas berbasis untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari KPS. Pada saat yang sama, mereka mungkin memanfaatkan otoritas-prinsip berbasis untuk memberlakukan, menyebarkan, dan mempromosikan norma pemerintah-an internasional tertentu kewenangan tersebut dapat beresonansi lebih bagi

mereka pelaku yang berbagi tujuan tersebut, daripada pemerintah yang mungkin hanya memiliki komitmen nominal atau terbatas pada norma-norma ini.

Kerangka otoritas ini menunjukkan bahwa peserta KPS dapat memanfaatkan didelegasikan, ahli, dan otoritas kapasitas mereka untuk mempromosikan norma-norma tata kelola internasional dengan pemerintah kapasitas tahan dan / atau rendah, sementara mengguna-kan otoritas prinsip untuk mengga-lang dukungan lebih lanjut dari mitra seperti hati dan stakeholder. Norma-norma ini mungkin termasuk nilai-nilai demokrasi liberal seperti kebebasan dasar (misalnya, pidato, agama, dan perakitan), hak asasi manusia, dan terkait perilaku pemerintahan yang baik. Beberapa norma-norma ini, seperti akuntabi-litas, keadilan, inklusi sosial, dan pemberdayaan merupakan bagian dari alasan-alasan yang jelas untuk berbagai jenis KPS, seperti digambarkan pada Tabel 1.

Kontribusi Symposium

Bagian ini ikhtisar dan komen-tar pada kontribusi untuk buku ini. Diskusi menganggap tujuan contoh KPS, dan mengeksplorasi bagaimana kasus-kasus kemitraan menerangi pertanyaan penyediaan tunjangan bagi publik dan promosi / sesuai dengan norma-norma tata kelola yang baik internasional diperkenal-kan di atas. Sementara masing-masing artikel memiliki implikasi untuk dua tujuan tersebut (publicness dan norma-norma internasional), penekanan relatif mereka bervariasi.

Dalam hal tujuan KPS disebutkan pada Tabel 1, contoh yang disajikan dalam artikel di sampul simposium semua tujuan kecuali infrastruktur.

Artikel Arthur Goldsmith terlihat di KPS perusa-haan sosial yang menargetkan pem-

angunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Alyson Lipsky membahas kemitraan pelayanan yang melibatkan organisasi keagamaan sebagai penyedia layanan kesehatan di Afrika. Jennifer Brinkerhoff menilai peran diaspora sebagai mitra dalam pembangunan internasional KPS untuk tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan kapasitas. Artikel oleh Susan Aaronson dan Anna Wetterberg melihat kemitraan dengan kedua kebijakan interna-sional dan tujuan pembangunan ekonomi. ulasan Aaronson dan analisis kasus Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), yang menetapkan spesifik KPS untuk memerangi korupsi dan memastikan bahwa sumber daya yang dihasilkan oleh eksploitasi sumber daya alam berkontribusi pada pembangunan nasional. Wetterberg meneliti pengalaman Pabrik Lebih Baik Kamboja (BFC) kemitraan, yang berusaha secara bersamaan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan bahwa produsen pakaian Kamboja memenuhi standar perburuhan yang akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari investasi multinasional.

Penyediaan Layanan Publik

Dalam membahas aktor KPS tertentu, tiga dari artikel eksplisit mengatasi publicness. Dua dari kontribusi untuk buku ini membahas keunggulan komparatif pelaku swasta baru sebagai mitra, dan bagaimana fitur mendefinisikan dari, dan alasan-alasan untuk, kemitraan kondisi keterlibatan mereka dalam KPS. J. Brinkerhoff mengeksplorasi prospek organisasi

diaspora sebagai mitra untuk pembangunan interna-sional. Diaspora migran yang mempertahankan sambungan, psiko-logis atau materi, ke negara asal mereka merupakan potensi besar un-tuk berkontribusi pada pembangunan negara asal mereka. Mereka melakukannya melalui asosiasi informal seperti masyarakat berbasis internet, organisasi filantropi nirlaba, bisnis, dan asosiasi advokasi (lihat, misalnya, Brinkerhoff, 2009). artikelnya menawarkan berbagai pelajaran dari pengalaman LSM untuk menginformasikan strategi organisasi kemitraan diaspora.

Dia memperingatkan masyarakat donor mengenai asumsi teruji bahwa tujuan kontribusi diaspora ke daerah asal mereka dapat rapi terkooptasi dalam pelayanan pembangunan nasional, baik publik. Sementara kepentingan pribadi organisasi diaspora harus hati-hati ditimbang dengan tujuan umum bersama kemitraan tersebut, isu dia menyoroti kurang salah satu publik versus kepentingan pribadi, dan tunjangan publik akan berkurang dari waktu ke waktu. Penyerapan anggota diaspora menjadi kemitraan yang terbangun antara donor atau didominasi pemerintah dapat mengurangi sangat layanan bahwa negara-negara asal dan donor berusaha untuk memanfaatkan. Seiring waktu, kapasitas kemitraan tersebut untuk menghasilkan aliran risiko umum manfaat ts memburuk tanpa perhatian.

Demikian pula, Lipsky mengeksplorasi potensi layanan dari organisasi berbasis agama (FBO), secara khusus untuk kemitraan menargetkan pemberian layanan kesehatan di Afrika. FBO telah disampaikan pelayanan publik kepada mereka yang membutuhkan secara global untuk beberapa waktu, namun sering beroperasi relatif independen. peran

mereka dalam arena layanan tertentu - seperti pelayanan kesehatan - menerima perhatian baru, karena beberapa alasan. Pertama, karena track record mereka dalam melayani populasi sulit dijangkau, mereka mungkin menjadi mitra penting dalam upaya untuk memenuhi MDGs terkait kesehatan. Kedua, keprihatinan saat ini dengan pelayanan yang berkelanjutan telah menyebabkan minat dalam mengintegrasikan FBO lebih dekat ke dalam sistem kesehatan nasional. Lipsky membandingkan dan kontras FBO dan LSM sekuler sebagai mitra, dan menerangi layanan dan kelemahan yang menjadi ciri FBO.

Adapun kriteria dalam hal layanan publik (Gambar 1), penerapan layanan mereka untuk kemitraan untuk pelayanan rutin atau penyediaan jasa dalam situasi darurat (peran lama untuk FBO) adalah pada kesempatan yang kontroversial. Misalnya, di U. S., pemerintahan Bush santai aturan yang melarang FBO yang menerima dana pemerintah untuk memberikan bantuan darurat dari dakwah di kalangan populasi penerima, memprovokasi kekhawatiran di beberapa tempat untuk mengaburkan batas antara gereja dan negara. Beberapa FBO tempat keterbatasan pada penyediaan layanan HIV / AIDS berdasarkan keyakinan agama dan striktur yang mengabaikan praktik terbaik medis. Dengan kata lain, FBO memiliki tujuan yang berbasis agama swasta bersama tujuan pelayanan. Dengan demikian, kemitraan FBO-pemerintah menghadapi interpretasi yang berbeda dari keinginan dan kesesuaian mereka, dan akan memerlukan negosiasi hati kebersamaan dan identitas organisasi masalah untuk mencapai hasil pelayanan publik yang dimaksudkan.

Artikel Goldsmith menghadapkan keseimbangan layanan publik-swasta

kepentingan dan manfaat dalam kemitraan yang meminta perusahaan-perusahaan swasta dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Dia meninjau pengalaman dari berbagai perusahaan sosial, melihat lembaga keuangan mikro, pemasaran pro-miskin 'dasar piramida' konsumen, rantai pasokan yang adil untuk kedua produk pertanian dan non-pertanian, teknologi tepat guna (misalnya, ponsel), dan investasi modal ventura sosial. Ini perusahaan sosial biasanya membuat kemitraan dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan / atau nasional, pemerintah, LSM, dan asosiasi masyarakat. analisisnya mencatat bahwa sementara pemikiran teoritis untuk perusahaan sosial berpendapat bahwa mencapai masyarakat miskin (notabene keuntungan untuk negara berkembang) bisa menjadi lebih efisien dibandingkan dengan apa yang akan dipertahankan melalui investasi swasta saja. Dalam prakteknya, KPS yang meluncurkan perusahaan sosial sangat bergantung pada kontribusi dari sektor publik dan mitra masyarakat sipil. Dia menyimpulkan bahwa untuk perusahaan sosial KPS untuk terus menghasilkan manfaat publik dalam bentuk pengurangan kemiskinan, sumber daya berkelanjutan publik yang diperlukan.

Kasus Aaronson dan Wetter-berg ini memperbesar publicness melampaui batas-batas nasional untuk mengungkapkan bagaimana mereka KPS berkontribusi tidak hanya untuk layanan publik di masing-masing negara, tetapi juga untuk produksi barang publik global, diwujudkan dalam norma-norma internasional (dibahas lebih lengkap di bawah). EITI secara eksplisit berusaha untuk menetapkan batas atas keuntungan pribadi - terutama mereka yang berasal dari korupsi -

melalui promosi transparansi dalam perjanjian industri ekstraktif dengan pemerintah, menggunakan masyarakat sipil nasional dan validator dari masyarakat internasional sebagai anjing penjaga. BFC kemitraan meliputi hak-hak buruh ke dalam operasionalisasi publik.

Tata Kelola Pemerintahan yang Berstandar Internasional

EITI dan BFC adalah contoh kemitraan yang berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap seperangkat norma-norma internasional terkait dengan tata kelola yang baik: transparansi, mengurangi korupsi, dan menghormati hak asasi manusia. diskusi Aaronson tentang EITI mencatat rekor campuran kemajuan dalam membangun negara KPS meskipun komitmen didukung dari berbagai mitra. analisisnya mengungkapkan keragaman motivasi antara para mitra, yang menyoroti kesulitan dalam mencapai kebersamaan yang menjadi ciri khas ekspresi sepenuhnya kemitraan. Faktor positif adalah penerimaan di seluruh dunia meningkat dari norma-norma internasional sekitar transparansi mengenai eksploitasi sumber daya, yang telah membantu untuk mendorong apa adalah proses kepatuhan sukarela. KPS meliputi kewenangan yang didelegasikan dari Bank Dunia dan aktor internasional pendukung lainnya, otoritas ahli validator, dan, setidaknya dalam teori, otoritas kapasitas masyarakat sipil sebagai pengawas. Dia mengamati bahwa tujuan tambahan penting dalam EITI adalah membangun kapasitas untuk keterlibatan masyarakat sipil dalam pemerintahan eksploitasi sumber daya alam, yang memegang janji untuk ekspresi yang lebih lengkap pada tingkat negara dari norma-norma internasional yang EITI berusaha untuk

memberikan efek. Dia memperingatkan, bagaimana-pun, bahwa masyarakat sipil tetap mitra lemah di KPS, di mana ketidakseimbangan kekuatan mendukung pemerintah dan perusahaan multinasional.

BFC kemitraan menggambarkan bagaimana prinsip berbasis otoritas, dikombinasikan dengan insentif pasar, dapat mencapai perubahan perilaku sesuai dengan norma-norma internasional, dalam hal ini standar ketenagakerjaan kasus untuk melindungi hak-hak pekerja Kamboja Kasus KPS ini mengga-bungkan berlakunya norma-norma internasional dengan produk layanan publik; di Kamboja, kondisi pabrik bekerja diperbaiki dan penyalahgunaan buruh yang terorganisir dibatasi. Wetterberg meneliti BFC dalam hal interaksi antara kompetensi khas, bunga, dan otoritas dari tiga mitra (pemerintah, industri garmen, dan Organisasi Buruh Internasional), yang memungkinkan KPS untuk menegakkan standar perburuhan diamanatkan internasional bahwa tidak ada anggota kemitraan bisa mencapai individual. Dengan demikian, BFC mencontohkan bagaimana karakteristik kembar kemitraan - mutualitas dan identitas organisasi - dapat menggabungkan untuk menghasilkan hasil yang sinergis. analisis menunjukkan bahwa keberhasilan BFC dicapai telah sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi global; penurunan permintaan dari konsu-men negara maju untuk fashion item mengungkapkan kerentanan ketergantungan KPS pada satu industri. Namun demikian, beberapa negara lain telah menunjukkan minat dalam model kemitraan BFC.

Sumber daya spesifik yang dimaksud dalam artikel ini juga membahas potensi mempromosikan norma-norma internasional. Diaspora

memiliki potensi untuk mempromosikan norma-norma dan nilai-nilai berpengalaman dan diperoleh melalui pengalaman migrasi dan di negara mereka yang baru diadopsi tinggal internasional. Dalam pemahaman mereka dari kedua negara asal dan negara budaya dan norma tinggal, mereka mungkin sangat baik terletak untuk bertindak sebagai penyiar norma (Brinkerhoff dan Riddle, 2011). Organisasi berbasis agama, berdasarkan keunggulan komparatif mereka dalam mencapai miskin dan berdiri moral dan etika mereka, memberikan kontribusi untuk memberlakukan pelayanan dan pemerintahan target normatif internasional, seperti Millenium Development Goals. Akhirnya, usaha sosial, diri, mewujudkan norma-norma internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan; yaitu, prinsip bahwa bisnis swasta memiliki tanggung jawab sosial lebih dari sekedar layanan keputusan.

KESIMPULAN

KPS terus menyita perhatian pembuat kebijakan, administrator publik, dan peneliti akademis mencari konsep dan mekanisme yang menjanjikan untuk (a) memobilisasi sumber daya luar yang tersedia untuk entitas sektor publik sendiri, dan (b) menawarkan solusi untuk masalah yang kompleks organisasi. Kemitraan 'mata uang' telah mendevaluasi oleh terlalu sering menggunakan istilah, sehingga beberapa menganggapnya sebagai konseptual kosong dan hanya politis. Namun, premis di balik lokakarya penelitian yang menyebabkan masalah khusus ini dan kontribusi untuk buku ini adalah bahwa pemeriksaan KPS tetap baik analitis valid dan praktis berharga.

Di antara kesimpulan yang dapat

ditarik dari kontributor dan eksplorasi kita bersama adalah sebagai berikut. Pertama, pelaku sektor publik (nasional dan transnasional) mencari mitra baru untuk berkontribusi sumber daya mereka yang unik dan kapasitas untuk mengatasi tantangan global yang pencarian telah menyebabkan beberapa 'teman seranjang,' gelisah yang menyoroti pentingnya memahami keunggulan komparatif dan kepentingan pelaku datang bersama-sama dalam kemitraan. Ini menempatkan penekanan pada dimensi mutualitas kemitraan jika sinergi diantisipasi harus diperoleh dari kompetensi khas yang berasal dari identitas organisasi. Kesimpulan ini sangat penting untuk keterlibatan diaspora dalam kemitraan pembangunan internasional, sebagai artikel J. Brinkerhoff menunjukkan.

Kedua, sementara dominasi sektor publik dapat merusak manfaat diantisipasi kemitraan, jika publicness melekat dalam KPS adalah untuk direalisasikan, tidak harus kepentingan pribadi mendikte hubungan bersama. Mencapai keseimbangan yang tepat dari kepentingan dan insentif antara mitra heterogen menantang. Analisis Goldsmith dari perusahaan sosial KPS dan pengurangan kemiskinan menimbulkan pertanyaan ini, seperti orang lain melihat sektor swasta dan kemitraan pembangunan internasional (misalnya, Kolk et al., 2008). Potensi kepentingan yang berbeda juga hadir dalam penggunaan FBO untuk pelayanan kesehatan, seperti yang dibahas oleh Lipsky.

Ketiga, aspek good governance kemitraan, sebagai prinsip-prinsip pengoperasian kemitraan dan / atau sebagai tujuan eksplisit, menambahkan lapisan kompleksitas desain kemitraan dan operasi di luar metrik dari efisiensi, efektivitas, dan sinergi. Bertindak atas

prinsip-prinsip ini berarti bahwa inklusi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan perilaku etis menjadi bagian integral fungsi kemitraan (Bovaird, 2004; Brinkerhoff, 2007). Unsur-unsur normatif dari KPS - yang bisa dikatakan melekat pada mekanisme KPS sendiri - telah mungkin sampai sekarang berada di bawah diakui. Potensi KPS untuk mewujudkan dan mempromosikan norma tertentu dan nilai-nilai memiliki kedua implikasi instrumental dan etika dalam hal ahli waris dan / atau pasangan penentuan nasib sendiri dan kepemilikan hasil KPS. Selain itu, karena KPS fungsi membutuhkan komitmen dan kepercayaan, di mana lingkungan operasi mengecilkan atau merusak elemen-elemen inti, seperti di negara-negara berkembang di mana pemerintahan yang baik terbatas atau kurang, kemampuan kemitraan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan (baik barang publik / manfaat ts, tata pemerintahan yang baik, atau keduanya) diletakkan pada risiko. Tingginya variasi dalam kemajuan bahwa dokumen Aaronson dengan EITI tingkat negara KPS adalah demonstrasi jelas dari ancaman ini.

Keempat, penggunaan kemitraan untuk mengatasi masalah transnasional menarik perhatian pada sumber yang berbeda dari otoritas yang beroperasi dalam kombinasi dalam kemitraan tersebut (Avant et al., 2010). Karena kemitraan menurut Batley (2006) kegiatan mitra, misalnya, mencatat bahwa banyak penyedia layanan non-negara penting, seperti pengusaha lokal, praktisi individu, dan organisasi berbasis masyarakat, yang tersisa dari KPS, dan mungkin terlalu diatur tanpa memperhatikan tujuan bersama. Dalam hal ini konstruksi organisasi cenderung jauh dari hirarki, yang berdiri dari peserta menjadi penting untuk hubungan

kekuasaan mereka antara satu sama lain. Berbagai sumber otoritas menambahkan nuansa dan kompleksitas penentuan kekuasaan dan latihan dalam waktu KPS. Mitra membawa lebih dari satu jenis wewenang kepada KPS, dan mungkin relatif lemah dalam satu, sedangkan yang relatif kuat di lain. Analisis Wetterberg untuk Kamboja BFC menunjukkan faktor ini.

Kesimpulan akhir yang muncul dari pemeriksaan kami KPS mungkin pernyataan yang jelas, tapi yang tetap dikenakan berulang. Permutasi dari tujuan kemitraan, struktur, dan proses yang sangat besar. Fakta ini membatasi penerapan umum dari setiap set kesimpulan, dan menyarankan hati-hati dalam mentransfer spesifik cs dari satu pengaturan yang lain. Hal ini juga membuka pintu untuk mengingat, untuk beberapa jenis barang dan jasa publik, kemitraan mungkin tidak menjadi kendaraan yang paling tepat. Kompleksitas dan kesulitan dalam membuat KPS bekerja secara efektif menunjukkan bahwa mereka harus diterapkan terutama untuk masalah-masalah sosial yang menyerukan layanan tertentu kemitraan. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa mungkin ada trade-off antara layanan mereka; misalnya, inklusivitas layanan yang dapat menambahkan biaya dan menyulitkan akuntabilitas. Membuat pilihan seperti menimbulkan sekali lagi segi kekuatan kemitraan tertanam di Provan dan Kenis '(2007) pertanyaan tentang siapa yang akan memutuskan mana manfaat kemitraan KPS manfaat yang paling menonjol?

DAFTAR PUSTAKA

Andres LA, Guasch JL, Haven T, Foster V. (2008). *The Impact of Private Sector Participation in*

- Infrastructure: Lights, Shadows, and the Road Ahead*. The World Bank: Washington, DC.
- Austin JE. (2006). *Sustainability through partnering: conceptualizing partnerships between businesses and NGOs*. In *Partnerships, Governance and Sustainable Development: Reflections on Theory and Practice*, Glasbergen P, Biermann F, Mol APJ (eds). Edward Elgar Publishers: Cheltenham, UK and Northampton, MA; 49–67.
- Avant DD, Finnemore M, Sell SK. (2010). *Who governs the globe?* In *Who Governs the Globe?* Avant DD, Finnemore M, Sell SK (eds). Cambridge University Press: Cambridge and New York; 1–31.
- Batley R. (2006). Engaged or divorced? Cross-service findings on government relations with non-state service-providers. *Public Administration and Development* 26(3): 241–251.
- Bö rzel TA. (2002). Organizing Babylon on the different conceptions of policy networks. *Public Administration* 76(2): 253–273.
- Bö rzel TA, Risse T. (2005). *Public-private partnerships: effective and legitimate tools of international governance?* In *Complex Sovereignty: Reconstituting Political Authority in the Twenty-First Century*, Gr E, Pauly LW (eds). University of Toronto Press: Toronto; 195–216.
- Bovaird T. (2004). Public-private partnerships: from contested concepts to prevalent practice. *International Review of Administrative Sciences* 70(2): 199–215.
- Brinkerhoff DW, Brinkerhoff JM. (eds). (2002). Government-nonprofit relations in comparative perspective. *Public Administration and Development* 22(1).
- Brinkerhoff JM. (2002a). Government-NGO partnership: a defining framework. *Public Administration and Development* 22(1): 19–30.
- Brinkerhoff JM. (2002b). *Partnerships for International Development: Rhetoric or Results?* Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Brinkerhoff JM. 2007. *Partnership as a means to good governance: toward an evaluation framework*. In *Partnerships, Governance and Sustainable Development: Reflections on Theory and Practice*, Glasbergen P, Biermann F, Mol APJ (eds). Edward Elgar Publishers: Cheltenham, UK and Northampton, MA; 68–89.
- Brinkerhoff JM. (2009). *Digital Diasporas: Identity and Transnational Engagement*. Cambridge University Press: Cambridge, UK.
- Riddle L. 2011. *Diaspora entrepreneurs as institutional change agents: the case of Thamel.com*. *International Business Review* 20(5) (in press).
- Brinkerhoff JM, Smith SC, Teegen H. (2008). *Beyond the 'non': the strategic space for NGOs in development*. In *NGOs and the Millennium Development Goals*, Brinkerhoff JM, Smith SC, Teegen H (eds). Palgrave MacMillan: New York; 53–81.
- Bull B, McNeill D. (2007). *Development Issues in Global Governance: Public-Private Partnerships and Market Multilateralism*. Routledge; New York.

- Edgar L, Marshall C, Bassett M. 2006. *Partnerships: Putting Good Governance Principles in Practice*. Institute on Governance: Ottawa.
- Evans B, McMahon J, Caplan K. (2004). *The partnership paper chase: structuring partnership agreements in water and sanitation in low income communities*. Building Partnerships for Development in Water and Sanitation, London.
- Ghobadian A, Gallear D, O'Regan N, Viney H. (eds). (2004). *Public-Private Partnerships: Policy and Experience*. Palgrave Macmillan: New York.
- Grimsey D, Lewis MK. (2007). *Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*. Edward Elgar Publishing Limited: Northampton, MA.
- Hodge GA, Greve C. (2007). Public-private partnerships: an international performance review. *Public Administration Review* 67(3): 545–558.
- Hodge G, Greve C. (2008). *The PPP debate: taking stock of the issues and renewing the research agenda*. Paper presented at the International Research Society for Public Management, Annual Conference, Brisbane, Australia, March 26–28.
- Johnston J, Romzek BS. (2005). *Traditional contracts as partnerships: effective accountability in social service contracts in the American states*. In *The Challenge of Public-Private Partnerships: Learning from International Experience*, Greve C, Hodge G (eds). Edward Elgar Publishing: Northampton, MA; 117–143.
- Keck ME, Sikkink K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press: Ithaca, NY.
- Kolk A, van Tulder R, Kostwinder E. (2008). Business and partnerships for development. *European Management Journal* 26: 262–273.
- Koppell JGS. (2010). *World Rule: Accountability, Legitimacy, and the Design of Global Governance*. University of Chicago Press: Chicago.
- Koppenjan J. (2005). The formation of public-private partnerships: lessons from nine transport infrastructure projects in the Netherlands. *Public Administration* 83(1): 135–157.
- Koppenjan J, Enserink B. (2009). Public-private partnerships in urban infrastructures: reconciling private sector participation and sustainability. *Public Administration Review* 69(2): 284–296.
- Krishna A. (2003). Partnerships between local governments and community-based organizations: exploring the scope for synergy. *Public Administration and Development* 23(4): 361–371.
- Mandell MP, Steelman TA. (2003). Understanding what can be accomplished through interorganizational innovations: the importance of typologies, context and management strategies. *Public Management Review* 5(2): 197–224.
- North DC. (2004). *Partnership as a means to improve economic performance*. In *Evaluation and*

- Development: The Partnership Dimension*, Liebenthal A, Feinstein ON, Ingram GK (eds). World Bank Series on Evaluation and Development, Vol. 6. The World Bank: Washington, DC; 3–7.
- Osborne SP (ed). (2000). *Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective*. Routledge: London.
- Pesch U. 2005. The Predicaments of Publicness. Eburon Academic Publishers: Delft, The Netherlands.
- Provan KG, Kenis P. (2007). Modes of network governance: structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18: 229–252.
- Rhodes RAW. 1990. Policy networks: a British perspective. *Journal of Theoretical Politics* 2(2): 293–317.
- Rhodes RAW. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity, and Accountability*. Open University Press: Buckingham, UK
- Rosenau P (ed.). 2000. *Public-Private Policy Partnerships*. MIT Press: Cambridge, MA.
- Sansom K. (2006). Government engagement with non-state providers of water and sanitation services. *Public Administration and Development* 26(3): 207–217.
- Sell S. (2009). *Public private partnerships and philanthropy: computer software, drug donations, and technical assistance*. Paper presented at the Research Workshop on Public Private Partnerships: Addressing Global Challenges and Opportunities, George Washington University and RTI International: Washington, DC, June 5.
- Sen A. 1999. *Development as Freedom*. Random House: New York.
- Smillie I. (1995). *The Alms Bazaar: Altruism Under Fire — Non-profit Organizations and International Development*. International Development Research Center: Ottawa.
- Waddell S, Khagram S. (2007). *Multi-stakeholder global networks: emerging systems for the global common good*. In *Partnerships, Governance and Sustainable Development: Reflections on Theory and Practice*. Glasbergen P, Biermann F, Mol APJ (eds). Edward Elgar: Cheltenham, UK and Northampton, MA; 261–287.
- Weihe G. (2006). *Public-private partnerships: addressing a nebulous concept*. Working Paper No. 16, International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School: Frederiksberg, Denmark.
- Wescott G. (2002). Partnerships for capacity building: community, governments and universities working together. *Ocean and Coastal Management* 45(9–10): 549–571.
- Wettenhall R. (2003). The rhetoric and reality of public-private partnerships. *Public Organization Review* 3: 77–107.
- World Bank. (2005). *Exploring partnerships between communities and local governments in community driven development: a framework*.
- (2012). *Report No. 32709-GLB World Bank. Environmentally and Socially Sustainable Development Network*. Washington, DC, June 29